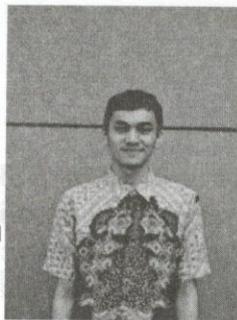


Oleh :  
Nilwan Wize Ananda Zen



### Abstrak

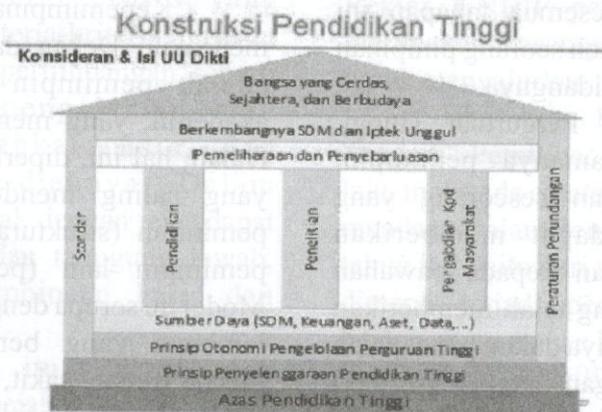
Bila waktu adalah rangkaian titik, maka bagi Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukumnya, inilah saat yang menjadi titik-titik akhir masa kepemimpinan birokrasi sebelum akhirnya dilakukan pergantian atau suksesi pimpinan. Pemilihan Rektor dan Pemilihan Dekan Fakultas Hukum tercinta kita diselenggarakan pada tahun ini.

### PENDAHULUAN

Perguruan tinggi adalah lembaga institusi pendidikan tinggi yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat kompleks karena perguruan tinggi bertindak sebagai organisasi yang di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menentukan. Bersifat unik karena organisasi tersebut memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lainnya, yang menempatkan perguruan tinggi memiliki karakter tersendiri. Sifatnya yang kompleks dan unik itulah yang membuat perguruan tinggi sebagai

organisasi memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi.

Pendidikan tinggi adalah wahana akademik, tempat berkumpulnya para ilmuwan, dimana pengelolaannya harus bisa mengakomodir semua unsur dan kepentingan di dalamnya secara profesional. Berbicara tentang pendidikan tinggi tentunya harus terlebih dahulu mengetahui unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalamnya. Kontruksi berikut memberikan gambaran tentang pendidikan tinggi:



sumber: Nizam (sekjen DIKTI)

Gambar ini menunjukkan kompleksitas dalam tata kelola Pendidikan Tinggi. Atmosfer akademik akan tercipta jika civitas akademika yang merupakan 3 unsur utama didalam Pendidikan Tinggi yaitu dosen, mahasiswa dan pegawai harus bisa bersinergi dalam memainkan peranannya.

Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat merupakan Tri Dharma Pendidikan Tinggi yang tugasnya di emban oleh setiap dosen sebagai tenaga pendidik/tendik/fungsional. Sedangkan untuk pengelolaan sumber daya (SDM, keuangan, aset, data, sistem informasi, dan lainnya) biasanya ditugaskan kepada pegawai sebagai tenaga kependidikan/distendik/struktural. Hal ini senada dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN dan RB) nomor 34 tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan. Sedangkan mahasiswa sangat jelas sekali posisinya sebagai objek yang sangat vital dalam Pendidikan Tinggi.

Keberadaan dan keberhasilan sebuah lembaga Pendidikan Tinggi sangat bergantung pada input, proses, output dan outcome, dimana kesemua tahapan ini harus dikendalikan oleh seorang pimpinan yang capable dalam bidangnya.

Dalam suatu Perguruan Tinggi, tentu ada yang namanya pemimpin. Pemimpin merupakan seseorang yang dipercaya untuk dapat memberikan komando atau arahan kepada bawahan atau orang-orang yang telah memberikan kepercayaan kepadanya dalam pencapaian tujuan tertentu, dengan harapan pemberi kepercayaan akan lebih baik nasibnya

dibandingkan dari kepemimpinan sebelumnya. Seorang pemimpin juga harus bisa mempengaruhi dan memotivasi bawahannya sehingga bawahan tersebut dapat bergerak sesuai dengan yang diinginkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ketika kita berbicara mengenai pemimpin di suatu perguruan tinggi, maka pikiran kita akan tertuju pada satu kata, yaitu Rektor. Rektor, secara sederhana, adalah pimpinan tertinggi dalam sebuah institusi pendidikan tinggi yang bertanggung jawab atas keberlangsungan institusi tersebut. Keberhasilan perguruan tinggi (PT) tidak terlepas dari keberhasilan pimpinan institusi PT tersebut.

Rektor dianggap berhasil apabila dia memahami keberadaan PT sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan selayaknya seorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin institusi PT tersebut. Studi keberhasilan Rektor menunjukkan bahwa Rektor adalah seseorang yang menentukan titik pusat dan irama suatu PT, bahkan lebih jauh lagi, studi tersebut menyimpulkan keberhasilan seorang rector adalah keberhasilan PT.

Kepemimpinan struktural di PT mencakup Dekan dan Rektor. Mereka adalah pemimpin administratif dan akademik yang mendukung para dosen. Dalam hal ini, diperlukan kepemimpinan yang saling mendukung dimana ada pemimpin (struktural) yang mendukung pemimpin lain (pemimpin keilmuan). Model ini serupa dengan kepemimpinan di lembaga yang berbasis pengetahuan, misal: rumah sakit, lembaga konsultan, dan lembaga penelitian. Dekan dan Rektor

diharapkan pemimpin memimpin

## PEMBAHASAN A. Proses Rektor

Di c...  
kepemimpin...  
yaitu kepe...  
leadership)...  
(informal l...  
formal terj...  
organisasi, j...  
organisasi te...  
yang ditunju...  
seleksi. S...  
informal t...  
pemimpin c...  
oleh orang...  
berpengaruh...  
memiliki ke...  
sumber ya...  
mampu men...  
serta mamp...  
anggota org...

Berd...  
dapat diket...  
jabatan k...  
dilaksana...  
didasarkan...  
yang menja...  
latar bela...  
pendidika...  
integritas...  
kepemimpin...  
pula dilihat...  
masa jaba...  
sebagainya.

Oleh...  
hakikatnya...  
pengangkata...

diharapkan dapat menjadi sosok pemimpin yang kompeten untuk memimpin sebuah sistem yang solid.

## PEMBAHASAN

### A. Proses dan Tata Cara Pemilihan Rektor

Di dalam lingkungan organisasi, kepemimpinan terjadi melalui dua bentuk, yaitu kepemimpinan formal (formal leadership) dan kepemimpinan informal (informal leadership). Kepemimpinan formal terjadi apabila di lingkungan organisasi, jabatan otoritas formal dalam organisasi tersebut diisi oleh orang-orang yang ditunjuk atau dipilih melalui proses seleksi. Sedangkan kepemimpinan informal terjadi dimana kedudukan pemimpin dalam suatu organisasi diisi oleh orang-orang yang muncul dan berpengaruh terhadap orang lain karena memiliki kecakapan khusus atau berbagai sumber yang dimilikinya dirasakan mampu memecahkan persoalan organisasi serta mampu memenuhi kebutuhan dari anggota organisasi yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa untuk mengisi jabatan kepemimpinan formal harus dilaksanakan melalui proses yang didasarkan atas kriteria-kriteria tertentu yang menjadi bahan pertimbangan, seperti latar belakang pengalaman atau pendidikan, pangkat, usia, dan integritas/kepribadiannya. Dalam kepemimpinan formal, dengan jelas dapat pula dilihat tugas dan tanggung jawab, masa jabatan, pembinaan karir dan sebagainya.

Oleh sebab itu, Rektor pada hakikatnya adalah pejabat formal, sebab pengangkatannya melalui suatu proses dan

prosedur yang didasarkan atas aturan yang berlaku.

Kita ketahui semua bahwa tahun 2014 merupakan tahun bersejarah bagi perjalanan kepemimpinan di Indonesia. Tahun 2014 juga merupakan tahun bersejarah bagi perjalanan kepemimpinan di lingkungan Universitas Diponegoro tercinta kita. Baik dalam lingkup universitas yaitu Pemilihan Rektor, maupun di tingkat fakultas yaitu Pemilihan Dekan. Pemilihan Rektor dan Dekan saat ini merupakan isu paling hangat di kalangan civitas academica Universitas Diponegoro. Pemilihan Rektor dan Dekan bukan hanya menentukan siapa yang memegang jabatan tersebut, tetapi berhubungan dengan apa yang akan menjadi masa depan Universitas Diponegoro beberapa tahun ke depan.

Kita sadar bahwa Universitas Diponegoro (UNDIP) merupakan universitas terkemuka yang membutuhkan seorang pemimpin yang tak hanya visioner dan mampu membawa UNDIP sebagai World Class University, tetapi juga mampu merakyat serta memiliki kedekatan terhadap mahasiswa. Pemilihan Rektor UNDIP periode 2014-2018 ini merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi kritisnya.

Jika kita bandingkan dengan "tragedi" Pemilihan Rektor UNDIP 2010 lalu, maka ada catatan penting yang sangat mendasar dalam Pemilihan Rektor UNDIP tahun ini, yaitu dari sudut pandang yuridis dimana terjadi perubahan pada dasar hukum penyelenggaraannya. Sebelumnya, Pemilihan Rektor 2010 kita mengacu pada Peraturan Rektor UNDIP No. 1 Tahun 2010, kemudian bergeser

menjadi Peraturan Rektor UNDIP No 2 Tahun 2014. Secara keseluruhan, substansi dari peraturan ini tidak ada yang berubah dan bisa mengikuti perkembangan yang ada, yaitu untuk melaksanakan pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Rektor UNDIP No 2 Tahun 2014 diatas, dijelaskan tentang tata cara pemilihan, persyaratan, serta mekanisme pemilihan pimpinan universitas maupun pimpinan fakultas. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan pasal demi pasal, bahwa salah satu persyaratan umum untuk diangkat sebagai Rektor dan Dekan diantaranya berusia tidak lebih dari 60 tahun saat dilantik, salah satu persyaratan khusus yaitu minimal berpendidikan Doktor bagi calon Rektor dan Dekan, serta tidak pernah dikenai sanksi akademik dan atau non akademik dari Universitas.

Kemudian, untuk Pemilihan Rektor berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf k Peraturan Rektor UNDIP No 2 Tahun 2014, dilakukan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:

- Menteri memiliki 35% hak suara dari total pemilih; dan
- Senat Universitas memiliki 65% hak suara dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama.

Dalam hal ini sesuai pasal 2 huruf a Peraturan Rektor UNDIP No 2 Tahun 2014, Senat Universitas terdiri dari (Guru

besar/profesor, pimpinan UNDIP, Dekan, direktur program pascasarjana, ketua lembaga, dan wakil dosen yang ditetapkan Senat Universitas dan mempunyai hak pilih).

Pemilihan Rektor Universitas Diponegoro periode 2014-2018 ini diikuti oleh empat bakal calon Rektor, dimana keempatnya merupakan profesor dari tiga fakultas di Universitas Diponegoro ini. Keempat bakal calon Rektor tersebut adalah Prof M. Nasir (Fakultas Ekonomi), Prof M. Syafruddin (Fakultas Ekonomi), Prof Lazarus Tri Setyawanta (Fakultas Hukum), dan Prof Purwanto (Magister Ilmu Lingkungan UNDIP).

Kemudian, untuk persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam mendaftar bakal calon Rektor, yakni jabatan minimal lektor kepala, berpendidikan minimal strata dua (S2), dan berusia maksimal 60 tahun.

Selanjutnya, keempat bakal calon Rektor tersebut akan menjalani tahapan seleksi selanjutnya, yakni pemaparan visi-misi dari masing-masing bakal calon Rektor yang akan dibarengi dengan pengerucutan menjadi tiga calon. Berdasarkan jadwal dari panitia Pemilihan Rektor sendiri pada 10 September mendatang, keempat calon akan menjalani pemilihan tahap pertama. Dari empat bakal calon itu, akan disaring menjadi tiga orang. Setelah tersaring tiga calon Rektor, dilanjutkan tahapan Pemilihan Rektor UNDIP periode mendatang oleh anggota senat yang hasilnya akan dikirimkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Terkait dengan akan dipilihnya tiga nama untuk menjadi calon Rektor dari empat nama bakal calon Rektor yang

sudah lolos tahap pemberkasan, maka tepat pada tanggal 10 September 2014 sesuai dengan yang telah direncanakan Panitia Pemilihan Rektor, akan diadakan rapat senat terbuka yang bertujuan untuk memilih tiga nama yang akan menjadi kandidat calon Rektor.

Pada saat rapat senat terbuka yang dilaksanakan di Gedung Soedharto, telah dilakukan pembacaan dan pemaparan visi misi oleh empat bakal calon Rektor tersebut, dan pada saat itu pun mahasiswa turut hadir hanya untuk duduk manis dan menjadi pendengar yang baik. Setelah dilaksanakan pemaparan visi misi, pada hari yang sama, diadakan rapat senat tertutup guna menyaring empat bakal calon Rektor menjadi tiga kandidat calon Rektor.

Dalam proses penyaringan pada rapat senat tertutup yang dihadiri 123 orang dari 133 anggota senat UNDIP yang hadir, Prof Dr. Lazarus Tri Setyawanta dipastikan tidak akan mengikuti proses selanjutnya karena hanya memperoleh 1 suara dukungan. Tiga bakal calon lainnya, yaitu Prof Muhammad Nasir PhD mendapat 87 suara, Prof Dr. M Syafruddin mendapat 22 suara, dan Prof Dr. Purwanto mendapat 13 suara. Akhirnya, pada tanggal 29 September 2014 terpilihlah Prof Muhammad Nasir PhD sebagai Rektor UNDIP periode 2014-2018. Hasil Pemilihan Rektor adalah sebagai berikut:

1. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Prof Muhammad Nasir mendapatkan 148 suara
2. Ketua Jurusan Akuntansi FEB Prof M Syafruddin mendapatkan 36 suara
3. Ketua Program Doktor dan

Magister Ilmu Lingkungan Prof Purwanto mendapatkan 14 suara

Jumlah itu ditambah dengan suara Mendikbud yang diwakilkan kepada Sekretaris Ditjen Dikti Kemdikbud, Dr. Ir. Patdono Suwignyo, MEngSc sebanyak 72 suara atau 35 persen dari total suara senat UNDIP. Maka, total suara dalam Pilrek UNDIP kali ini sejumlah 198 suara.

Melihat dari proses panjang yang telah dilalui untuk melakukan Pemilihan Rektor ini, yang kita harapkan sebenarnya adalah agar UNDIP akan menjadi lebih dewasa dan lebih baik lagi ke depannya.

Sesuai jadwal dari panitia Pemilihan Rektor, direncanakan pelantikan Rektor baru akan dilakukan bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Rektor saat ini yakni Profesor Sudharto Prawata Hadi, yaitu pada 18 Desember 2014 bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Rektor periode 2010-2014.

Rektor terpilih nanti setidaknya memiliki tugas untuk meningkatkan produktivitas ilmu pengetahuan ilmiah di kampus. Tidak semata-mata pengetahuan ilmiah yang hanya memenuhi hasrat intelektual, tetapi juga ilmu pengetahuan yang berpihak pada masyarakat. Peningkatan produktivitas ini akan terlihat dari parameter standar seperti publikasi laporan penelitian, jurnal, maupun buku. Kita semua tahu bahwa para intelektual tidaklah hidup di atas angin (a free floating intellegentia), begitu pula dengan para intelektual UNDIP yang tidak terlepas dari konteks masyarakat dimana mereka berada. Kesadaran inilah yang bisa dilihat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Pendidikan, Penelitian, dan

Pengabdian masyarakat.

Oleh sebab itu, tugas utama sang Rektor adalah berusaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang bersifat transformatif dan melakukan penelitian-penelitian yang mampu menjadi solusi alternatif atas berbagai permasalahan bangsa yang semakin beragam. Apabila harapan tersebut dapat terlaksana, maka UNDIP tidak akan menjadi menara megah yang angkuh dan tercabut dari lingkungan masyarakatnya. UNDIP pun dapat semakin menegaskan jati dirinya sebagai universitas kerakyatan yang mengabdikan pada kepentingan masyarakat Indonesia dan bukan kepentingan golongan oportunistis pragmatis. Mari berharap.

#### **B. Pemilihan Dekan dan Peranan Dekan Idaman**

Berdasarkan pasal 1 ayat (9) Peraturan Rektor No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan UNDIP dan Pimpinan Fakultas pada lingkungan UNDIP, kita ketahui bersama bahwa Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat fakultas. Dalam hal ini, tentu Dekan fakultas dalam lingkungan Universitas Diponegoro. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang Dekan bertanggung jawab dalam menciptakan atmosfer kerja kondusif di tempat yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk tujuan itu, Dekan hendaknya mampu menjalin hubungan kerja harmonis baik ke dalam maupun keluar fakultas.

Hubungan ke dalam diantaranya mencakup hubungan-hubungan dengan unit-unit akademik maupun staf pendukung non akademik, diantaranya:

(a) hubungan sinergis dengan para Pembantu Dekan, Ketua Jurusan dan bawahannya, Ketua Program Studi dan bawahannya, dosen, mahasiswa, dan unsur-unsur akademik lainnya. (b) Dekan juga berperan cukup signifikan dalam menciptakan kondisi kerja yang baik antar staf dengan staf lainnya dalam lingkungan fakultas (man to man), staf dengan sarana prasarana (man to tools/machine). (c) Menegakkan aturan-aturan dan disiplin fakultas sebagaimana yang telah disepakati bersama, memberikan motivasi yang proporsional sesuai kebutuhan staf, dan menghindari munculnya konflik internal yang tentu saja akan mempengaruhi kinerja staf dalam upaya mencapai tujuan fakultas.

**K e m a m p u a n D e k a n** mendayagunakan segala potensi yang ada dari dalam sebagai motor penggerak pencapaian tujuan fakultas merupakan faktor terpenting dalam pengelolaan fakultas. Dekan hendaknya jeli melihat setiap kesempatan untuk melejitkan proses, produk dan output fakultas melalui kolaborasi yang selaras dan harmonis.

Mengenai hubungan ke luar, Dekan bukanlah seorang penjaga Fakultas. Seorang Dekan yang dibutuhkan pada era persaingan kualitas universitas saat ini adalah figur pimpinan fakultas yang energik, inovatif, dan memiliki hubungan baik dengan berbagai pihak termasuk unsur-unsur dari luar yang relevan dengan pencapaian tujuan fakultas. Unsur-unsur tersebut misalnya yayasan, staf universitas di luar fakultas (Rektor, pembantu Rektor, kepala departemen, Dekan dari fakultas lain), dan lembaga-lembaga lain yang mendukung

tegak berdirinya universitas. Sedangkan unsur-unsur lain seperti masyarakat, orang tua mahasiswa, media massa, pemerintah, alumni, LSM, dunia usaha, dunia industri, agen perjalanan, lembaga pendidikan lain, dan penjaga keamanan. Aspek yang terpenting adalah unsur-unsur pendukung tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap fakultas, sehingga fakultas dapat melayani mahasiswa lebih baik dan produktif. Selain itu, Dekan juga hendaknya memiliki jiwa entrepreneur yang baik sehingga terjalin hubungan-hubungan yang saling menguntungkan.

Oleh sebab itu, Dekan dalam hal ini tentu mempunyai tanggung jawab yang besar pula, meskipun ruang lingkup Dekan hanyalah berupa lingkup fakultas, tapi dalam fakultas pun masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan dibenahi. Apalagi, visi FH UNDIP sendiri adalah untuk menjadikan Fakultas Hukum UNDIP sebagai fakultas yang unggul di Indonesia dan se Asia-Pasifik 2018. Maka, Pemilihan Dekan adalah fase yang penting untuk menentukan kebijakan-kebijakan dan perubahan yang mungkin terjadi di Fakultas Hukum UNDIP beberapa tahun ke depan.

Berbeda dengan Pemilihan Rektor, Pemilihan Dekan akan berlangsung di beberapa Fakultas di UNDIP untuk beberapa bulan kedepan. Termasuk di dalamnya Pemilihan Dekan Fakultas Hukum UNDIP yang kemungkinan besar akan digelar pada bulan Agustus-Oktober mendatang. Sesuai jadwal, Pemilihan Dekan akan dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2014 yang akan dipilih melalui rapat senat tertutup.

Pemilihan Dekan FH UNDIP

sendiri juga didasarkan pada Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 2 tahun 2014 tersebut. Namun, dalam Pemilihan Dekan, yang membedakannya dengan Pemilihan Rektor adalah proses pemilihannya, karena Pemilihan Dekan sesuai dengan pasal 19 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 2 tahun 2014 dimana Dekan dipilih oleh Senat Fakultas dalam sidang Senat Fakultas.

Senat Fakultas yang dimaksud disini adalah para Guru Besar/Profesor, Dosen FH UNDIP sendiri yang ditetapkan sebagai Senat Fakultas. Jika Pemilihan Rektor dilaksanakan oleh panitia yang diketuai oleh Prof Sunarso selaku sekretaris Senat Universitas, Pemilihan Dekan sendiri diselenggarakan oleh panitia Pemilihan Dekan yang diketuai oleh Bu Tri Laksmi selaku sekretaris Senat Fakultas.

Mengenai Pemilihan Dekan yang bertujuan untuk mencari sosok pemimpin baru di tingkat fakultas, mari sejenak kita melirik pernyataan yang sangat menarik yang diibaratkan oleh Tucker bahwa seorang Dekan fakultas setidaknya harus dapat berperan atau memposisikan dirinya dalam tiga model peran. Ketiga peran tersebut adalah the dove of peace, the dragon, dan the diplomat. Pada saat tertentu, Dekan hendaknya sanggup berperan sebagai merpati perdamaian (the dove of peace). Semisal, ketika terjadi konflik internal di lingkungan fakultas. Di sinilah peran Dekan yang adil dapat melihat hal-hal apa yang kurang untuk dilengkapi. Dekan juga perlu mengetahui potensi yang sesungguhnya ada tetapi belum dikembangkan secara maksimal

agar dapat didayagunakan, atau hal-hal yang tidak dilaksanakan dengan efektif di kalangan departemen, jurusan, dan mahasiswanya agar dilaksanakan secara efektif dengan asupan inovasi yang memadai dan berkelanjutan.

Pada saat lain, Dekan harus sanggup berperan sebagai seekor naga (the dragon) yang mampu mengarahkan ke arah yang lebih efektif, efisien, dan etis dari tuntutan gerak maju kekuatan internal maupun eksternal yang berpotensi mengancam sistem nilai, kestabilan keuangan, maupun integritas dari unit-unit akademik yang sudah berlaku dengan baik. Dengan kata lain, hanya Dekan berkepribadian naga yang dapat melakukan hal-hal tersebut.

Sementara itu, Dekan juga pada saat lain berperan sebagai seorang diplomat (the diplomat). Hanya seorang Dekan yang berjiwa diplomatis yang dapat membawa dan menyemangati kehidupan fakultas agar tetap tegar berdiri dari berbagai kritik baik dari dalam maupun dari luar fakultas yang tidak jarang hanya bisa melihat kesalahan saja dan menyuguhkan kritik-kritik pedas tanpa memberikan dukungan solusi yang memadai.

Ada juga pendapat yang mengatakan, *the spirit of faculty is the spirit of the dean*. Idealnya setiap fakultas memiliki spirit atau nilai-nilai tertentu, misalnya disiplin diri, tanggung jawab, kebersamaan, dan keterbukaan. Spirit dan nilai-nilai tersebut akan mewarnai pembentukan struktur organisasi fakultas, penyusunan deskripsi tugas, sistem dan prosedur kerja fakultas, kebijakan dan aturan-aturan fakultas, upaya perbaikan

berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya yang maksimal, dan tata tertib melekat yang dapat melejitkan sebuah fakultas yang kuat. Semua tanggung jawab itu bertengger di bahu kokoh seorang Dekan terpilih nantinya.

Memang, tidak dapat dipungkiri bahwa kunci keberhasilan suatu fakultas dalam sebuah universitas pada hakikatnya terletak pada efisiensi dan efektivitas kepemimpinan seorang Dekan. Keberhasilan fakultas adalah keberhasilan Dekan dan keberhasilan Dekan adalah keberhasilan fakultas. Banyak pemikir pendidikan tinggi yang mengklaim bahwa roh sebuah universitas adalah fakultas. Bilamana fakultas mampu mengenal kondisinya saat ini, menetapkan target yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, mampu mengatasi kultur internal maupun eksternal, serta memperluas akses yang diiringi dengan akuntabilitas sepanjang proses tersebut, maka cita-cita memiliki sebuah fakultas yang tangguh bukanlah sesuatu yang tidak mungkin.

### **C. Peran Mahasiswa (*Agent Of Change*) di masa regenerasi pimpinan kampus**

Kata Mahasiswa dibentuk dari dua kata dasar yaitu "maha" dan "siswa". Maha berarti besar atau agung, sedangkan siswa berarti orang yang sedang belajar. Kombinasi dua kata ini menunjuk pada suatu kelebihan tertentu bagi penyandanginya. Di dalam PP No. 30 Tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu (Bab I ps.1 [6]), yaitu lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. (Bab II ps. 1 [1]).

Dengan demikian, mahasiswa adalah anggota dari suatu masyarakat tertentu yang merupakan "elit" intelektual dengan tanggung jawab terhadap ilmu dan masyarakat yang melekat pada dirinya, sesuai dengan "tridarma" lembaga tempat ia bernaung. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berada pada tataran elit karena kelebihan yang dimilikinya, yang dengan demikian mempunyai kekhasan fungsi, peran, dan tanggung jawab. Dari identitas dirinya tersebut, mahasiswa juga mempunyai tanggung jawab intelektual, tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab moral.

Mahasiswa yang kritis dan peka terhadap lingkungan selalu tanggap dan sadar apabila terjadi gejolak atau perubahan pada masyarakat. Dengan rasa peduli dan sikap sosialisasinya, mahasiswa dapat berperan dalam menjaga kestabilan sosial. Kontrol sosial yang dilaksanakan mahasiswa tentu tidak main-main, seperti apabila dalam suatu kawasan yang masyarakatnya sedang dalam konflik atau dalam gunjang-ganjing persoalan baik intern atau ekstern, maka saat itu pula mahasiswa terjun langsung dalam kawasan tersebut. Secara naluriah, mahasiswa yang notabene memiliki cara pandang objektif dan idealis realistik lebih mudah menyelesaikan suatu konflik daripada masyarakat intern itu sendiri yang mungkin diselimuti ego subjektif masing-masing. Suatu demonstrasi juga merupakan aksi mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial apabila dalam pengambilan putusan pemerintahan terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi masyarakat. Tentulah mahasiswa besar kaitannya dengan kontrol sosial.

Namun, pokok permasalahannya adalah bagaimana perang mahasiswa dalam pemilihan pimpinan kampus ini? Apakah mahasiswa terlibat langsung atau malah diacuhkan dan tidak diberdayakan sama sekali? Pemilihan Rektor dan Dekan memang tanggung jawab institusi, dalam hal ini Senat Universitas dan Senat Fakultas, tapi perlu menjadi catatan penting bagi kita bahwa mahasiswa sebagai elemen terbesar dari sebuah universitas juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam proses Pemilihan Rektor dan Dekan ini. Bukan sekedar karena gelar 'mahasiswa', peran penting ini harus diambil karena Rektor dan Dekan yang terpilih nantinya akan berpengaruh sangat besar terhadap arah gerak Universitas ataupun Fakultas nantinya, termasuk berbagai kebijakan akademik dan kemahasiswaan. Sebagai contoh bahwa sesuai dengan Permendiknas No. 65 tahun 2009, Rektor memiliki kewenangan yang besar dalam menentukan setiap kebijakan Universitas dalam empat tahun masa jabatannya, seperti kebijakan anggaran, UKT, jalur masuk, pembangunan fisik maupun non fisik dan kebijakan lainnya.

Terkait dengan tugas Rektor terpilih, berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan pendidikan yang belum selesai hingga sekarang mutlak harus dilanjutkan penyelesaiannya. Mulai dari masalah keterbukaan informasi, penyelenggaraan rumah sakit pendidikan yang hingga kini belum berfungsi, ruang kuliah yang masih belum memadai, hingga berbagai fasilitas penunjang perkuliahan yang belum tersedia. Di saat yang sama, visi UNDIP menjadi universitas riset sudah memasuki tahap III 2015-2019, padahal masih

banyak catatan merah yang harus diperbaiki dari tahapan sebelumnya. Terlebih kebijakan perubahan status hukum UNDIP dari Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang sangat berdampak, utamanya pada mahasiswa, menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Rektor terpilih nanti.

Seperti yang dijelaskan di atas, mengingat mahasiswa merupakan bagian terbesar dari sebuah universitas, peran mahasiswa dalam mengawal Pemilihan Rektor dan Pemilihan Dekan ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan tugas yang diemban oleh Rektor dan Dekan yang terpilih nantinya akan berpengaruh besar terhadap arah kebijakan Universitas serta Fakultas, termasuk dalam hal kemahasiswaan.

Dengan begitu banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh para pimpinan kampus, baik Rektor maupun Dekan, maka perlulah kiranya mahasiswa mengetahui dan mengenal sosok orang yang akan memimpin universitas dan fakultas mereka. Namun, dalam penyelenggarannya baik itu Pemilihan Rektor maupun Pemilihan Dekan, rasanya masih kurang adanya publikasi untuk memperkenalkan kepada mahasiswa akan adanya pemilihan pimpinan kampus yang nantinya akan melayani mahasiswa dengan sepenuh hati. Dalam prosesnya, sebagian besar mahasiswa mengetahui para calon pemimpinnya hanya melalui foto atau spanduk baliho saja, tanpa mengetahui secara lebih dekat kepribadian ataupun program-program setiap calon pemimpinnya.

Sesuai dengan peraturan yang ada, memang mahasiswa tidak memiliki hak pilih dalam menentukan Rektor dan Dekan, tetapi momentum Pemilihan Rektor dan Dekan ini hanya terjadi setiap 4 tahun sekali dan kita sebagai mahasiswa yang masih diberi kesempatan untuk mencicipi bangku kuliah di UNDIP jangan sampai melewatkan momentum ini dengan tidak melakukan apa-apa dalam pengawalan dan pengawasan Pemilihan Rektor dan Dekan saat ini.

Bukanlah suatu kemustahilan jika aspirasi mahasiswa dapat berpengaruh dan mempunyai andil yang besar khususnya dalam Pemilihan Rektor maupun Pemilihan Dekan kali ini. Harapan kita bersama adalah semoga dapat terpilih pimpinan kampus yang bersih, profesional, dan transparan melalui proses pemilihan yang demokratis. Siapapun yang akan terpilih nantinya, baik Rektor universitas maupun Dekan FH UNDIP, kita tentu berharap para pemimpin kampus ini tidak hanya memajukan UNDIP di tingkat nasional, tetapi tentunya juga di tingkat internasional.

## KESIMPULAN

Tanggal 18 Desember 2014 nanti, tepat empat tahun menjabat setelah dilantik, Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Rektor UNDIP untuk periode 2010-2014. Ini menjadi tanda bahwa Universitas Diponegoro akan melakukan perhelatan terbesar untuk memilih pemimpin baru universitas, yaitu **Pemilihan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2014-2018**, dan untuk Fakultas Hukum yang merupakan fakultas tertua di Universitas Diponegoro dengan nama besarnya beserta sejumlah kebanggaan lainnya pun akan melaksanakan **Pemilihan Dekan untuk periode 2015-2019**.

Meskipun saat ini kita sudah memiliki Rektor terpilih untuk periode 2014-2018, dan dalam ruang lingkup fakultas pun akan dilaksanakan Pemilihan Dekan, maka mahasiswa tidak boleh tinggal diam dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan regenerasi pemilihan pimpinan kampus kali ini. Mahasiswa memang tidak memiliki hak pilih dalam memilih dan menentukan Rektor dan Dekan, tetapi momentum yang hanya tiap empat tahun sekali ini rasanya sangat sayang untuk dilalui begitu saja.

Evaluasi besar terhadap kinerja Rektor serta Dekan saat ini dan rekomendasi sebagai bentuk aspirasi mahasiswa mutlak diberikan untuk kepemimpinan selanjutnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Rektor dan Dekan sehingga proses pemilihan yang demokratis, lebih profesional, dan transparan dapat terjadi supaya mimpi untuk memiliki pimpinan kampus yang dekat dengan mahasiswa dan berjuang di atas kepentingan mahasiswa bukan lagi hanya sekedar mimpi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dees, J.G., *Enterprising Nonprofits*, Harvard Business Review, January-February 1998.
- Forest.J.J.F, and Albatch, *International Handbook of Higher Education*, Netherland: Published by Spinger, 2006.
- Gaspersz, Vincent, *Continuous Cost Reduction Through Lean Six Sigma Approach*, Canada: Irvin Publishing Company, 2006.
- Peraturan Rektor No.2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan UNDIP dan Pimpinan Fakultas pada lingkungan UNDIP
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bagian Keempat pasal 19 s.d 25.

#### Catatan Akhir

- Peraturan Rektor No.2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan UNDIP dan Pimpinan Fakultas pada lingkungan UNDIP
- Alan Tucker and Robert A. Bryan, *The Academic Dean, Dove, Dragon and Diplomat*, Second Edition, New York: Macmillan Publishing Company, 1991, h. 12.
- Ibid. h. 9.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bagian Keempat pasal 19 s.d 25.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi, pasal 30, 45 s.d 48.
- Alan Tucker, op. cit. h. 218.
- Clark B.R., *Creating Entrepreneurial Universities: Organization Pathways of Transformation*, Paris: Published for the IAU Pergamon Press, 1998, h. 27.
- Bill Reading, *The University in Ruins*, Massachussets: Harvard University Press, 1999, h. 25.
- [http://sisfokampus.wordpress.com/Perguruan\\_Tinggi\\_Di\\_Antara\\_Globalisasi\\_dan\\_Internasionalisasi](http://sisfokampus.wordpress.com/Perguruan_Tinggi_Di_Antara_Globalisasi_dan_Internasionalisasi) diakses tanggal 20 Juli 2009, 23.51 Wib.

- Clark B.R., op. cit., h. 26.
- <http://jateng.tribunnews.com/2014/09/29/ini-hasil-pemungutan-suara-pemilihan-Rektor-UNDIP>
- [http://www.UNDIP.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2872:3-calon-Rektor-ditetapkan-senat-UNDIP&catid=78:latest-news](http://www.UNDIP.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2872:3-calon-Rektor-ditetapkan-senat-UNDIP&catid=78:latest-news)
- Lihat The Dove, The Dragon, and The Diplomat pada Abdul Kadir, 2010, Paradigma Peran Dekan Idea, Mataram, hlm. 16.

### **Biodata Penulis**

Nama : Nilwan Wize Ananda Zen

Tempat/Tanggal Lahir : Padang/22-Oktober-1994

Riwayat Pendidikan :

- Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- SMA Negeri 3 Batusangkar
- MTs Negeri Batusangkar
- SD Negeri 22 Pagaruyung
- TK Dharmawanita UNP Padang

Organisasi Yang Pernah Di ikuti :

- Kepala Bagian Hukum Sosial dan Politik BEM FH UNDIP 2014
- PMB Departemen Pengembangan Karir Mahasiswa BEM FH UNDIP 2013
- Anggota Divisi Debat UPK KRDFH UNDIP
- Anggota Departemen Kaderisasi UPK KSHI FH UNDIP